

masyarakat. Dampak dari perzinaan sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Atas dasar itu agama Islam menciptakan hukuman bagi pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah.³

Landasan untuk itu adalah firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁴

Perbuatan zina juga dapat merusak sendi-sendi agama dan moral serta meruntuhkan seluruh norma dan tatanan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang suci.⁵ Namun dengan adanya perzinaan maka menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kerusakan terhadap keturunan, dan berantakannya keluarga. Bahkan hingga menyebabkan tercabutnya akar kekeluargaan, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.⁶

³ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth), 78.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), 544.

⁵ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2004), 2.

⁶ Yusuf Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 134.

Adanya perbuatan *muhsanah* seharusnya dapat lebih menjaga dari untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Apalagi, jika masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya.⁷

Sesungguhnya ketika dua insan mengikat sebuah tali pernikahan, maka keduanya telah berjanji agar setia kepada pasangannya di kala senang dan maupun susah hingga akhir hayat. Namun terkadang sebuah ikatan yang telah ia jalin bersama pasangannya bisa saja terjadi cerai dan melupakan janji setia tersebut. Apalagi jika salah satu diantara mereka sudah melempar tuduhan berbuat zina kepada satunya. hingga mencapai suatu level dimana kedua belah pihak sudah tidak mungkin bersatu kembali, bahkan keduanya harus melakukan sumpah di hadapan hakim bahwa pasangannya telah berzina dengan orang lain. Inilah yang dikenal didalam fiqh disebut *li'ān*.

Kata "*li'ān*" terambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami istri yang saling ber*li'ān* (*bermulā'annah*) itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'ān* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar.⁸

⁷ M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih 2* (Solo, Aqila, 2013) 30.

⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh jilid II*, (Jakarta; 1984), 264.

Menurut istilah hukum Islam. *Li'ān* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁹

Menurut KHI yang disebutkan dalam pasal 126, *Li'ān* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.¹⁰

Li'ān terjadi apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu, padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'ān* terhadap istrinya itu. Caranya adalah Si suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkannya kepadanya istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya

⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta; Kencana, 2003)239.

¹⁰Pasal 126 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa murka Allah akan menyimpannya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.¹¹

Landasan untuk itu adalah firman Allah Swt dalam surat *An Nuur* ayat 6-9 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.¹²

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah *li'ān* terkandung beberapa hikmah antara lain:¹³

1. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka hati mereka akan sempit dan

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Dar al-Jawad; Beirut 1996)333.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 544.

¹³Ahmad Ali al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (falsafat dan Hikmah HukumIslam)*. Penerjemah : Hadi Mulyo dan Shobahussurur. (Semarang:CV. Asy-Syifa, 1992),334.

hilanglah kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.

2. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
3. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

Setelah berlangsung prosesi *li'ān* antara suami dan istri terjadilah perpisahan antara suami istri dan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan diantara keduanya. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu. Putusnya perkawinan tersebut menurut segolongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan *li'āmnya*, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan *li'āmnya* tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Imam Hanafi perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah me *li'ān* istrinya itu masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.¹⁴

Sebenarnya semua mazhab sepakat atas wajibnya berpisah bagi kedua orang tersebut sesudah mereka berdua bermulā'annah tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah si istri menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006),122.

disebabkan *mulā'anah*, dan bila si suami telah mengakui kedustaan dirinya, maka hilang pulalah keharaman itu. Ḥanafī memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang diantara keduanya mencabut sumpah *li'āmnya*. Ḥanafī berpendapat Dengan pencabutan itu keduanya dapat kembali dengan akad baru.¹⁸

Mayoritas para ulama' berpendapat bahwa pasca *mulā'anah*, istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selama-lamanya ,oleh karena itu disini penulis memfokuskan merujuk pada satu Mazhab saja yakni Mazhab Syafi'i yang juga berpendapat demikian, bahwasanya istrinya itu menjadi haram dia kawini untuk selamanya. Alasan penulis memilih Mazhab Syafi'i karena Muslim di Indonesia pada umumnya mengikuti ajaran atau mazhab Syafi'i. Sedangkan jelas yang memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan hanyalah Mazhab Ḥanafī .

Perbedaan pengambilan dasar hukum pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i tentang status istri *mulā'anah* tentu sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam, sehingga dengan begitu penulis dapat memaparkan perbedaan pemikiran keduanya, metode pengambilan hukum, ketentuan istri *mulā'anah* dari kedua pendapat yang saling berseberangan ini.

Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum

¹⁸Abu Bakar bin Mas'ud al- Kasani al-Hanafī, *Bada'I as-Shana'i fi Tartiibi as-Syara'i*, Juz III, (Beirut: Dar al-kutub al-Alamiah, t.th)245.

2. “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri yang *di li’ān*.” Skripsi ini ditulis oleh Nani nursamsiyah, mahasiswa Fakultas syari’ah IAIN walisongo Semarang ,2011. Skripsi ini membahas menurut Imam Abu Hanifah, *li’ān* disamakan dengan talak *ba’in*. Hal ini dikarenakan *li’ān* yang timbul dari pihak suami dan tak ada campur tangan dengan pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal terhadap istri selama masa *iddah*. *Istinbāth* Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya tentang kewajiban suami pada istri yang *dilli’ān* adalah dengan menggunakan *qiyas*. Sehingga hukumnya wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Semua itu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tegas pada suami agar lebih memperhatikan kebutuhan istri dan tanggung jawab sebagai suami.²¹

3. “Kedudukan Hukum Anak yang Lahir Akibat dari Perceraian *Li’ān* dalam Hukum Waris Islam” skripsi ini ditulis oleh Fariha yustisia mahasiswa Fakultas hukum Universitas Jember, 2013. kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah anak yang dilahirkan akibat dari *li’ān* mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap suami ibunya maupun terhadap laki-laki yang menyebabkan terjadinya suatu kelahiran tidak ada hubungan nasab. Secara yuridis ayahnya tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada

²¹Nani nursamsiyah “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri yang dili’an.” (Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2011).

dengan pengertian anak sah yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42. Secara implisit dalam ketentuan undang-undang ini, status anak yang dilahirkan sebab *li'ān* tetap disebut sebagai anak yang sah.²³

Dari hasil kajian pustaka tersebut, penulis memiliki penilaian bahwa perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Skripsi yang akan ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan kepada perspektif dua mazhab mengenai status hukum istri setelah melakukan sumpah *li'ān*. Berdasarkan hasil penelusuran penulis tersebut, tidak berlebihan kiranya jika penulis mengatakan bahwa penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anaḥ*.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan analisis dari pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'anaḥ*.

²³ Atin Ratna Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Perceraian Sebab Li'an (Analisis Terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 42 Tentang Status Anak Sah)”. (Skripsi-- IAIN Walisongo, Semarang, 2008).

dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar penelitian yang memiliki unsur-unsur, di antaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai biografi Imam Ḥanafī, nama-nama guru dan murid beliau, kitab-kitab karya beliau, sejarah perkembangan dan penyebaran mazhab Ḥanafī, metode istinbāt mazhab Ḥanafī, dan pendapat Mazhab Ḥanafī tentang status hukum istri pasca *mulā'annah*.

Bab ketiga: Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai biografi Imam Syafi'i, nama-nama guru dan murid beliau, kitab-kitab karya beliau, sejarah perkembangan dan penyebaran mazhab Ḥanafī, dan pendapat Mazhab Syafi'i tentang status hukum istri pasca *mulā'annah*.

Bab keempat: Analisis Data. Dalam bab ini Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syafi'i terkait status hukum istri pasca *mulā'annah* akan dianalisis.

Bab kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.